

Sosialisasi Pentingnya NPWP Bagi UMKM Pada Usaha Ikan Bakar Laut Timor Dan Usaha Salon Hyra

*Agustina Suni¹, Ratri Paramitalaksmi²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Korespondensi penulis: agustinasuni28@gmail.com¹, ratri@mercubuana-yogya.ac.id

Article History:

Received: Desember, 11, 2023

Accepted: Desember 12, 2023

Published: Desember 31, 2023

Keywords: *sosialisas, NPWP, UMKM.*

Abstrak: *This study examines the significance of the taxpayer identification number (NPWP) for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) through case studies of two distinct industries: the salon industry and the Timor Sea grilled fish industry. A tax notification known as NPWP is necessary for all taxpayers, even MSMEs. In these two businesses, the lack of an NPWP has several detrimental effects, such as restricted financial access, transaction prohibitions, and legal restrictions. Financial surveillance and possible third-party cooperation are also impacted by this. In order to assist MSMEs in expanding and improving their enterprises, this study examines NPWP. In addition to being a tax requirement, having an NPWP is crucial for the growth of MSME enterprises.*

Abstrak

Studi ini mengkaji signifikansi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui studi kasus pada dua industri berbeda: industri salon dan industri ikan bakar Laut Timor. Pemberitahuan perpajakan yang dikenal dengan NPWP diperlukan bagi semua wajib pajak, termasuk UMKM. Pada kedua usaha tersebut, tidak adanya NPWP menimbulkan beberapa dampak buruk, seperti terbatasnya akses keuangan, larangan bertransaksi, dan pembatasan hukum. Pengawasan keuangan dan kemungkinan kerja sama pihak ketiga juga terkena dampak dari hal ini. Untuk membantu UMKM dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya, penelitian ini mengkaji NPWP. Selain sebagai syarat perpajakan, keberadaan NPWP juga menjadi hal yang krusial bagi pertumbuhan usaha UMKM.

Kata Kunci: sosialisasi, NPWP, UMKM.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, UMKM adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang perseorangan atau badan usaha perseorangan. Komite Pengawasan Pajak menekankan bahwa UMKM—usaha mikro, kecil, dan menengah—merupakan komponen penting perekonomian Indonesia. Berdasarkan angka Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia atau berkontribusi 61,07% terhadap PDB negara. Agar seorang wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, NPWP merupakan suatu alat yang digunakan dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas dirinya. Cara membuat NPWP agar Wajib Pajak dapat menggunakan layanan Registrasi Elektronik atau Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftar. Menurut Yohanis (2023), e-registrasi merupakan mekanisme pendaftaran wajib pajak secara online dan konfirmasi pengusaha kena pajak. Dengan pajak

yang mencakup lebih dari 75% seluruh komponen penerimaan negara, maka pajak merupakan sumber penerimaan utama baik bagi Negara Republik Indonesia maupun APBN (Alwi M, 2023). Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Inisiatif sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab keuangan dan pelaporan serta pemahaman mereka mengenai pajak (Yohanis, 2023).

Diketahui, UMKM Ikan Bakar Laut Timor dan Hyra Salon belum memiliki NPWP berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan di kedua usaha tersebut. Kurangnya NPWP dapat menimbulkan sejumlah kesulitan, termasuk implikasi perpajakan dan pembatasan hukum. Namun, memiliki NPWP memiliki keuntungan, seperti dukungan finansial, kemudahan transaksi bisnis, dan akses terhadap insentif perpajakan. Dampak tidak adanya NPWP terhadap UMKM yang menjalankan usaha Ikan Bakar Laut Timor dan Salon Hyra akan dibahas dalam penelitian ini.

METODE

Pelayanan disini menggunakan konseling sebagai pendekatan (sosialisasi). Staf mengunjungi lokasi usaha untuk memberikan edukasi kepada pemilik tentang pentingnya NPWP bagi UMKM sebagai bagian dari proses sosialisasi. Laptop, meja dan kursi diperlukan sebagai alat untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan sosialisasi (sosialisasi) ini. Kegiatan ini akan dilakukan melalui penyuluhan (sosialisasi) mengenai nilai NPWP bagi UMKM khususnya salon dan usaha makanan laut bakar Laut Timor. Setiap pemilik telah memberikan persetujuannya terhadap aktivitas ini. Melalui inisiatif sosialisasi ini, layanan ini bertujuan untuk menyadarkan setiap pemilik usaha akan pentingnya NPWP bagi UMKM. Sehingga para pemilik usaha dapat mengembangkan NPWP-nya sekaligus mengelola perusahaannya.

HASIL

Hyra Salon, terletak di Jl. Superraya No. 174 Karangasem Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, menyediakan layanan perawatan rambut dan wajah. Dibangun setahun yang lalu setelah epidemi 19 adalah Hyra Salon. Sementara itu, Jl. Gambuh No 2 Ganjuran, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rumah bagi perusahaan Ikan Bakar Laut Timor. Awal tahun 2023 berdirilah Perusahaan Ikan Bakar Laut Timor. Pemilik kedua perusahaan ini kini belum memiliki NPWP karena baru berdiri.

Pentingnya NPWP bagi UMKM khususnya bagi perusahaan yang menjual Hyra Salon dan Ikan Bakar Laut Timor. Dengan menggunakan NPWP, aspek-aspek berikut dapat dipahami:

Kewajiban pajak

NPWP mendorong kepatuhan pajak:

1. Legalitas usaha
NPWP merupakan kebutuhan krusial untuk memperoleh izin perusahaan.
2. Akses terhadap pasar
Pentingnya penggunaan NPWP dalam memilih mitra usaha.
3. Persyaratan pemerintah
Pemerintah seringkali menawarkan insentif yang memiliki batasan NPWP.
4. Aksesibilitas finansial
NPWP membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh dunia usaha.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Ini berfungsi sebagai identitas dan tanda pengenal pribadi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka NPWP adalah identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. NPWP Sementara hanya ada satu per wajib pajak.

Selain berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak, NPWP bertugas mengawasi administrasi perpajakan wajib pajak dan memastikan pajak dibayar tepat waktu dan patuh. karena nomor NPWP terhubung dengan semua dokumen terkait perpajakan.

Untuk memastikan informasi perpajakan Anda tidak tertukar dengan informasi wajib pajak lainnya, NPWP berfungsi sebagai kode khusus yang diterapkan secara konsisten di semua topik terkait perpajakan. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini, tim memberikan edukasi kepada Bapak Genaro dan Ibu Ari, pemilik salon, tentang pentingnya memiliki NPWP dalam menjalankan usaha. Berikut beberapa penjelasan berbagai hal:

Meminta Kredit dari Bank

NPWP merupakan dokumen lain yang perlu Anda miliki selain KTP jika ingin mengajukan pinjaman bank. Apa alasannya? Sederhananya, bank bisa mencari calon melalui

NPWP. Entah debitur sudah patuh membayar pajak, atau malah sebaliknya. Proses pengajuan kredit mungkin akan sedikit lebih sederhana jika Anda sudah memiliki NPWP. Lalu, fasilitas kredit apa saja yang mencantumkan NPWP dalam persyaratannya?

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
2. Kredit Tanpa Agunan (KTA).
3. Kartu kredit.
4. Kredit dengan banyak kegunaan.
5. Pinjaman mobil.
6. Membuat SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didasarkan pada beberapa hal di atas merupakan dokumen yang mengesahkan keabsahan suatu perusahaan. Ada beberapa dokumen administrasi yang perlu dimiliki untuk memulai SIUP. NPWP adalah salah satu dokumen tersebut.

Melamar Pekerjaan

NPWP seringkali dibutuhkan oleh pemberi kerja calon pekerja. Namun, jika belum bekerja, apakah masih bisa membuat NPWP?

Tampaknya Direktorat Jenderal Pajak memiliki kebijakan yang mendukung pembuatan NPWP bagi mereka yang berencana memasuki dunia kerja. Banyak Kantor Pelayanan Pajak yang biasanya menginginkan informasi tentang perusahaan tempat calon NPWP bekerja atau surat rekomendasi dari pemberi kerja.

Syarat Membuat Rekening Bank

Kita mengetahui ungkapan "uji tuntas pelanggan" (juga dikenal sebagai "CDD") ketika kita membuka rekening di bank. Upaya bank untuk mencari dan memvalidasi data calon nasabah dikenal dengan istilah CDD. Oleh karena itu, NPWP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk memvalidasi data calon nasabah. Satu-satunya alasan bank diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk meminta NPWP dilampirkan saat pembukaan rekening adalah untuk kepatuhan.

Syarat Mengikuti Lelang Proyek Pemerintah

Peserta lelang proyek di beberapa wilayah Indonesia wajib memiliki NPWP. Hal ini dilakukan dalam rangka pemberlakuan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mewajibkan adanya NPWP bagi peserta lelang/tender. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk menarik lebih banyak pembayar pajak.

Melaksanakan Urusan Perpajakan

Tujuan utama NPWP adalah ini. Memiliki NPWP tentu saja diperlukan bagi wajib pajak yang ingin mengajukan pajak dan membayarnya. Selain itu, wajib pajak yang memiliki NPWP tidak diwajibkan membayar pajak dengan tarif yang lebih besar dari tarif awal. Spot yang paling diuntungkan bagi pemegang kartu NPWP adalah yang ini.



Gambar 1. Dokumentasi bersama pemilik salon



Gambar 2. Dokumentasi bersama karyawan ikan bakar laut timor

KESIMPULAN

Untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor yang diberikan kepadanya sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri. UMKM adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau organisasi yang sesuai dengan definisi usaha mikro. Harapannya, kedua pemilik usaha tersebut bisa membuat NPWP dari sosialisasi yang dilakukan dinas. Hal ini akan membantu UMKM mengembangkan usahanya tanpa terjerumus ke dalam permasalahan perpajakan. Selain itu, pelaku UMKM yang memiliki NPWP juga berhak mendapatkan diskon pembayaran pajak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung jurnal ini, termasuk para dosen pembimbing yang selalu mendukungnya, Ibu Ari dan Pak Genaro sebagai pemilik usaha yang telah bersedia mencurahkan waktunya dalam pengerjaannya.

DAFTAR REFERENSI

Mardiasmo. (2017). Edisi Revisi Perpajakan.

Zainuddin, A.S., Andy, Ni'matun, D.W., dan Prafitriyani, R. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. 34–44 dalam *Jurnal Pendidikan Bisnis*, 1(1).

K. Pratt (2012). Taxpayer privacy and the rising constitutional right to tax transparency. *Yale Law Journal*, 29, pp. 143–198. In 2010.

Soman, D. An empirical analysis of tax compliance and self-employment in "The Last Mile" 31(2), 991–996, *Journal of Economic Psychology*.

R. S. Sulistyanto (2019). Pajak in both theory and practice. PT Indeks.

B. Torgler (2003). The question is whether or not to avoid taxes. 32(3), 283–302, *Journal of Socio-Economics*.

Budi, S. I., & Firmansyah, Y. A. (2017). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1).

Djali, S. K., & Djumahir. (2018). The Role of Taxpayer Awareness on Tax Compliance in Local Tax Revenue (STPD) in Tax Service Office of Makassar. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 263, 316-319.

Lotong Ta'dung, Yohanis & Althon K.Pongtuluran. (2023). SOSIALIASI PEMBUATAN NPWP MENGGUNAKAN APLIKASI E-REGISTRATION BAGI PELAKU UMKM DI LEMBANG RANDAN BATU, TANA TORAJA. Vol. 2, No. 1 Januari 2023. <https://www.mendeley.com/catalogue/028eb2ce-04e9-3633-b02b-83ad7e609076/>

Alwi, Muhammad SE., MS, dkk. (2023). PELATIHAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KELURAHAN GOMONG KECAMATAN SELAPARANG. Vol. 3, No. 2, Juni 2023. <https://www.mendeley.com/catalogue/ba59dafb-1aa7-311c-9154-0d3661224f15/>

Safitr, Candra, dkk. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. Volume (6), Nomor (1), Mei, 2023, pp. 58-71. <https://www.mendeley.com/catalogue/e788876b-50e3-3048-8079-0aaac688641c/>